



TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BAPPERIDA KOTA
SAMARINDA

Samarinda 15 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan keharidat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025, sebagai penjabaran dan aktifitas selama tahun pelaksanaan pembangunan.

Dokumen ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Rinerja Instansi Pemerintahan.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus di capai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Dengan adanya Dokumen Rencana Kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kota Samarinda, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Samarinda, 15 Januari 2025
Kepala Bapperida

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
NIP. 19681209 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Susunan Organisasi Bappedalitbang Kota Samarinda	8
BAB II : RENCANA STRATEGIS	14
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	14
B. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Program	16
BAB III : KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	19
A. Perencanaan Kinerja	19
B. Indikator Kinerja	20
C. Rencana Kinerja Tahunan	20
BAB IV : PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada tahun berjalan. Rencana Kinerja Tahunan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme dan disiplin pegawai di lingkungan Bapperida. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta untuk terlaksananya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur ligilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan yang bersih (Clean Government) dan mempertanggung jawabkan melalui Dokumen Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dn tata Cara Riviui Atas laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bapperida Kota Samarinda menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
7. Peraturan Pemerintah Tahun 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sisten Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Momor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi

Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Adapun Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

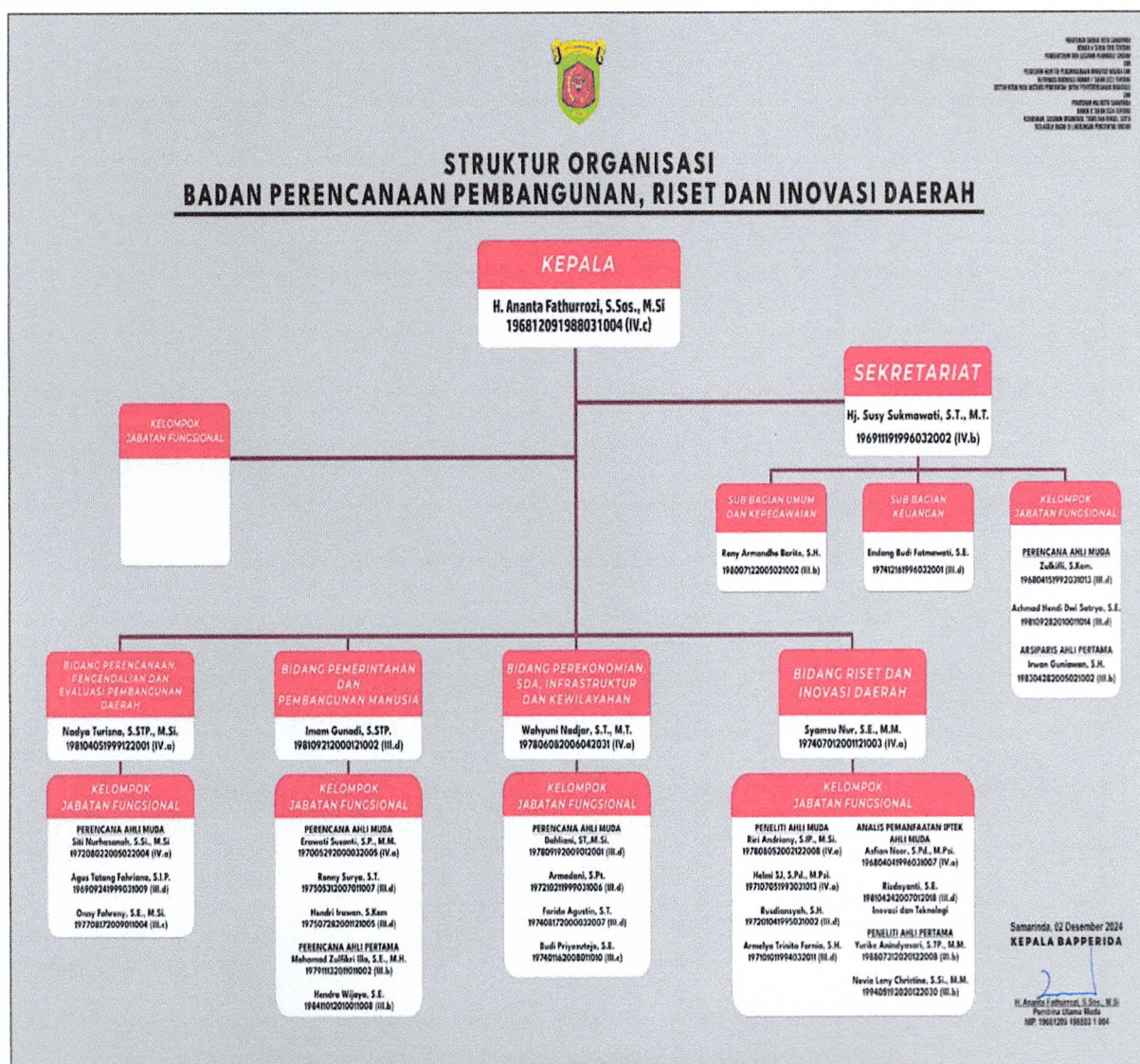
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. SUSUNAN ORGANISASI BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 101 (Seratus Satu) orang, terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural : 8 Orang
- b. Jabatan Fungsional Penyetaraan : 15 Orang
- c. Jabatan Fungsional : 7 Orang
- d. Staf / PNS : 36 Orang
- e. Honorer PTTB : 22 Orang
- f. Honorer PTTH : 13 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Tingkat Pendidikan:
 - a. S.3 : PNS 1 orang
 - b. S.2 : PNS 17 orang, PTTB 1 Orang
 - c. S.1 : PNS 33 orang, PTTB 16 orang, PTTH 4 Orang
 - d. Diploma : 1 Orang
 - e. S L T A : PNS 13 orang, PTTB 4 orang, PTTH 9 Orang
 - f. SLTP : 1 Orang
- 2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 66 orang, pegawai honorer PTTB sebanyak 22 orang, PTTH 13 orang.
- 3. Golongan Umur : PNS pada kelompok umur 30 - 39 sebanyak 5 orang, umur 40 - 49 sebanyak 34 orang, umur 50 – 59 sebanyak 26 orang. Honorer pada kelompok umur 20 - 29 tahun sebanyak 5 orang, umur 30 – 39 tahun

- sebanyak 22 orang, umur 40 – 49 tahun sebanyak 5 orang dan umur 50 – 59 tahun sebanyak 3 orang
4. Pangkat/Golongan PNS yaitu golongan II/c 3 orang, golongan II/d 4 orang, golongan III/a 7 orang, golongan III/b 9 orang pada golongan III/c 8 orang, golongan III/d 22 orang, golongan IV/a 10 orang, golongan IV/b 1 orang dan 2 orang pada golongan IV/c.
 5. Masa Kerja Pegawai : sebanyak 2 orang memiliki masa kerja antara 0–5 tahun; sebanyak 2 orang memiliki masa kerja antara 6–10 tahun; sebanyak 8 orang memiliki masa kerja antara 11- 15 tahun; sebanyak 19 orang memiliki masa kerja antara 16–20 tahun; sebanyak 25 orang memiliki masa kerja antara 21 – 25 tahun; sebanyak 8 orang memiliki masa kerja antara 26 - 30 Tahun; sebanyak 4 Orang memiliki masa kerja 31 – 35 tahun.
 6. Masa Kerja Pegawai Honorer : sebanyak 2 orang memiliki masa kerja 0 -5 tahun; sebanyak 9 orang memiliki masa kerja 5 – 10 tahun; sebanyak 24 orang memiliki masa kerja 10 – 15 tahun

Setelah melakukan percepatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategi organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menyusun program pembangunan dan penelitian dan pengembangan kota samarinda bidang perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan informasi program-program Pembangunan Kota Samarinda dari tahun ke tahun, sehingga tidak akan kehilangan informasi terhadap program maka yang

dapat dilaksanakan maupun yang belum Dilaksanakan atau aspek-aspek mana yang belum tersentuh dalam perencanaan.

2. Menyusun dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan, dokumen data dan informasi, dan dokumen evaluasi dan pelaporan, dokumen pemerintahan dan pembangunan manusia, dokumen bidang perekonomian dan SDA, bidang Infrastruktur dan kewilayahan, dan dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang social dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, dan inivasi dan tehnologi.
3. Meningkatkan kemampuan internal Bappedalitbang Kota Samarinda dengan jalan bekerja sama dengan pihak professional dalam melakukan penelitian terhadap suatu program/kegiatan pembangunan apakah layak atau tidak layak untuk dilaksanakan sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang berakibat pada inefisien dan inefektifitas terhadap anggaran pembangunan yang ada.
4. Meningkatkan kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait dalam kegiatan perencanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan pemerintah dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan. Langkah koordinasi dan sinkronisasi Bappelitbang Kota Samarinda selama ini sudah terprogram dengan baik, akan tetapi partisipasi dan perhatian aspirasi dalam forum koordinasi tersebut haruslah di tingkatkan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dan memberikan masukan kepada Kepala Daerah dan jajarannya letak kelebihan atau kekurangan proses pembangunan daerah Kota Samarinda serta mampu memberikan solusi terhadap masalah pembanguna daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Rencana strategis perangkat daerah sebagai mana memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman RPJMD bersifat indikatif.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Ada pun Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yaitu : **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.
2. Misi Kedua Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Misi Ketiga Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Misi Keempat Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Misi Kelima Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Bapperida Kota Samarinda dalam RPJMD 2021 – 2026 mendukung Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas korupsi. Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN, dirumuskan 10 (sepuluh) program prioritas yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita

7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (strat Up)

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bapperida Kota Samarinda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi Kota Samarinda, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Untuk menjadikan Bapperida Kota Samarinda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Samarinda.

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Adapun tujuan jangka menengah Bapperida Kota Samarinda yang mendukung capaian Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama "Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel".
2. Tujuan Kedua "Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat".

Untuk mengukur sejauh mana tujuan jangka menengah Bapperida Kota Samarinda maka ditetapkan sasaran-sasaran jangka menengah dengan indikator yang terukur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dapat dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Bappedalitbang Kota Samarinda dan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis. Sasaran Bapperida Kota Samarinda berdasarkan tujuan dan indikatornya yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama "Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel" dapat dicapai dengan sasaran :

a. Meningkatnya Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sebagai berikut :

➤ Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja

b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik, dengan indikator sebagai berikut :

➤ Indeks Inovasi Daerah

2. Tujuan Kedua "Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat" dapat dicapai dengan sasaran Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang dengan indikatornya IKM

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

Strategi 1 : Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat daerah.

Strategi 2 : Mengoptimalkan peranan Bapperida dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

Strategi 3 : Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya

Strategi 4: Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Bapperida Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,00	21,20	21,50	22,00	22,50
		2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	55	61	64	67	71
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bapperida	IKM	80	85	86	87	90

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh aparatur melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran yang akan di capai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu di muat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanan oleh OPD atau sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaan didukung oleh beberapa komponen-komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan dimuat pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya/target.

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Ada mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila suatu dikatakan bagus, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut bagus tersebut. Apabila dikatakan seseorang sudah paham, apa yang digunakan untuk menjelaskan tingkat pemahaman orang tersebut. Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan untuk menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian dengan menggunakan indikator kinerja.

C. Rencana Kinerja Tahunan.

Untuk merealisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Strategis Bapperida Kota Samarinda masing-masing dikembangkan dalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya

pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai Rencana Strategis Bapperida Kota Samarinda, maka program dan kegiatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik

- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPKMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - c. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - d. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - e. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi
 - a. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - b. Diseminisasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah daerah Yang Bersifat Inovasi
 - c. Sosialisasi dan Diseminasi hasil-Hasil Kelitbangan

KEPMEN 900.1.15.5-3406 Tahun 2024							
No	Kode Rekening			Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Pagu
	5	01	01		IKM	87 Nilai	28.186.778.899
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82	308.948.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.024.000
	5	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	71.604.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	47.320.000
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	13.336.296.788
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	5	01	01	2.02	01	74 Orang	11.985.121.067
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
	5	01	01	2.02	02	2 Dokumen	1.299.675.721
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	51.500.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	510.500.000
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	84.000.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	51.500.000
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	300.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	1.973.842.724
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	180.250.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	450.000.000

5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.360.726
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.231.998
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.750.000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	77.250.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	927.000.000
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	50.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	1.731.100.000
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	650.000.000
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	288.000.000
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	669.500.000

5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.600.000
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	103.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	1.304.548.728
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	436.978.728
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	867.570.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	9.021.542.659
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	611.956.409

5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	206.000.000
5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	150.000.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	464.000.000
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.690.100.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Capaian Kinerja Seluruh Perangkat Daerah	90 %	12.626.682.243
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4.922.168.950
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.378.010.600

5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	654.018.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	409.399.900
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	442.264.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	515.933.750
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20.000 Usulan	298.780.250
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.223.762.450
5	01	02	02.2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	1.920.740.000
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	614.629.500
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	1.306.110.500

5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.783.773.293
5	01	02	2.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4.785.161.000
5	01	02	2.03	02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	43.760.000
5	01	02	2.03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	954.852.293
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang PPM dan PSIW	90 %	4.781.664.500
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2.501.540.500
5	01	03	2.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	344.715.000

5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	56.409.000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	56.409.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	789.226.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	673.118.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	59.225.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	59.225.000

5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	463.213.500
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	1.305.785.850
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	300.455.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	80.544.000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	71.789.000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	70.151.000

5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	409.727.850
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	75.909.000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	68.699.000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	228.511.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	974.338.150
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	679.322.150
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	82.089.000

5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	72.819.000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	140.108.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	83,33 %	2.812.145.100
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	3 Dokumen	359.971.600
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	121.009.000

5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	118.447.600
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	120.515.000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	2 Dokumen	585.884.000
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	292.942.000
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	292.942.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	5 Dokumen	886.152.500
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	170.096.000
5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	370.741.000
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	111.537.000

5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	umlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	124.544.000
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	109.234.500
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	4 Dokumen	980.137.000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	371.008.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	190.591.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Dokumen	418.538.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kota Samarinda tahun 2025 ini merupakan komitmen Bapperida dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kota Samarinda tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat di lingkungan Bapperida Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian Kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.